

## BAB I

### INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

#### A. Kelembagaan Inspektorat

Pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yaitu dalam pasal 68, 69, 70 dan 71.

Untuk melaksanakan pengawasan umum sesuai undang-undang tersebut maka berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 220 Tahun 1979 dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061.1/5/1980 dibentuklah Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya.

Dalam perkembangannya, struktur organisasi tersebut diubah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor III Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya. Satu tahun kemudian terbit Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061.1/26/1992 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Jawa Tengah.

Seiring dengan waktu dan dinamika yang berkembang, Inspektorat Kabupaten Semarang mengalami beberapa perubahan nomenklatur dan struktur organisasi. Saat ini susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Semarang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Rincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Inspektur Daerah, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun kedudukan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

#### 1. Kedudukan

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Inspektur Daerah, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## 2. Tugas Pokok

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

## 3. Fungsi

Fungsi organisasi Inspektorat sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 4. Susunan Organisasi

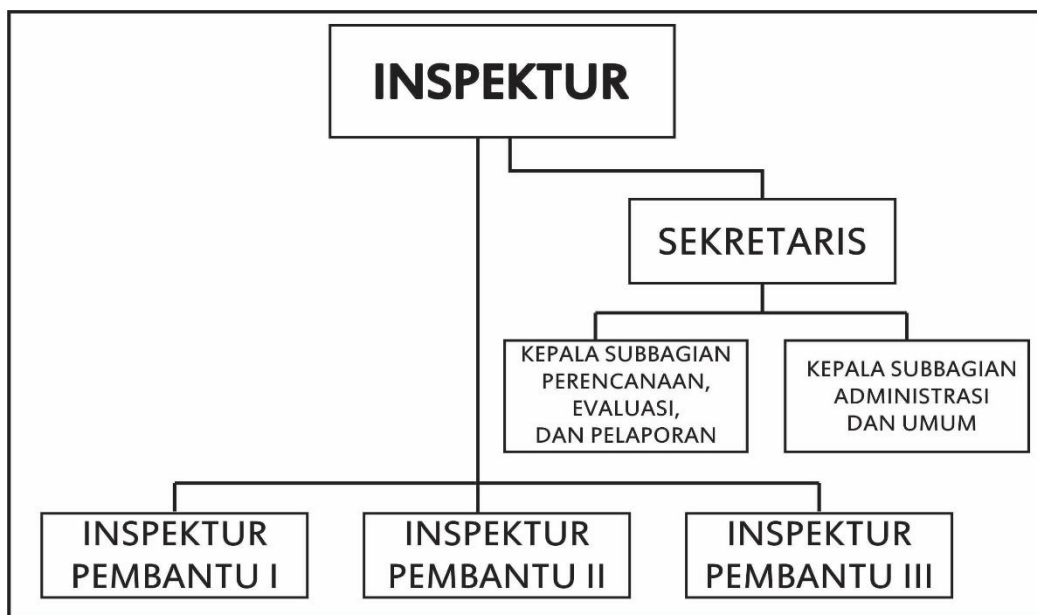
Berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Rincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, Inspektorat Kabupaten Semarang yang dipimpin oleh Inspektur membawahi:

- a. Sekretaris, terdiri atas :
  - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; serta
  - 2) Sub Bagian Administrasi dan Umum
- b. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah II; dan
- d. Inspektur Pembantu Wilayah III;

Inspektur Kabupaten Semarang sebagai motor penggerak roda Inspektorat Kabupaten Semarang memiliki tugas yang bersifat perencanaan, manajerial maupun eksekutor. Adapun rincian tugas inspektur adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan program kerja dan anggaran Inspektorat;

- b. Membagi tugas dan mengarahkan bawahan sesuai bidang tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan;
- d. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa;
- e. Mengoordinasikan dan fasilitasi kegiatan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan dalam rangka peningkatan kegiatan bidang pengawasan di tingkat Daerah;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan;
- g. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Inspektorat;
- h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## 5. VISI

*"Membangun Budaya tata pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pengawasan yang obyektif dan professional"*

## 6. MISI

Adapun dalam mencapai visi, Inspektorat melaksanakan misi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengawasan;
- b. Melakukan evaluasi dan pemantauan kinerja;
- c. Melaksanakan pembinaan di bidang Pengawasan;
- d. Diseminasi informasi pengawasan;
- e. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pengawasan;
- f. Melaksanakan kegiatan tata laksana Inspektorat Kabupaten Semarang.

**7. Alamat**

Inspektorat Kabupaten Semarang terletak di kompleks Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan serta Dinas Sosial Kabupaten Semarang. Alamat Inspektorat ada di Jalan Letjend. Suprpto No. 7A Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Kode Pos 50501, Nomor Telepon/Fax (024) 6921419.

**B. PROFIL PEJABAT INSPEKTORAT**

Saat ini PNS yang ditugaskan di Inspektorat Kabupaten Semarang berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang. Dengan peran masing-masing PNS ini dibagi dalam 3 (tiga) Inspektorat Pembantu dan Sekretariat.

Berikut ini profil pimpinan struktural di Inspektorat Kabupaten Semarang mulai dari Inspektur hingga kepala seksi.

**1. Inspektur**

- a. Nama : SOEMARDJITO, SH. MM.
- b. NIP : 19600523 198607 1 001
- c. Tempat/Tgl Lahir : Kab. Semarang / 23-05-1960
- d. Jenis Kelamin : Laki-laki
- e. Jabatan : Inspektur
- f. Pendidikan : S2
- g. Alamat :
- h. Riwayat Jabatan :

No	Jabatan	Tahun
	BELUM DIISI	

- i. Kekayaan  
Tidak Bergerak

No	Jenis	Lokasi	Nilai (Rp)	Tahun Perolehan	Asal Kepemilikan
	Tidak diisi				

Bergerak

No	Jenis	Lokasi	Nilai (Rp)	Tahun Perolehan	Asal Kepemilikan
	Tidak diisi				

## 2. Sekretaris

- a. Nama : Drs. DWI BAYU YUNANTONO  
 b. NIP : 19590617 198503 1 016  
 c. Tempat/Tgl Lahir : Ungaran / 17 Juni 1959  
 d. Jenis Kelamin : Laki-laki  
 e. Jabatan : Sekretaris  
 f. Pendidikan : S1  
 g. Alamat : Perum KCVRI No. 2 RT 04 RW 07 Gedangan Kecamatan Tuntang  
 h. Riwayat Jabatan :

No	Jabatan	Tahun
1.	Mantri Polisi Pamong Praja Kecamatan Bawen	1993
2.	Kasubsi Perekonomian pada Kantor Pembantu Bupati Semarang Wilayah Salatiga	1996
3.	Kasubsi Pemerintahan Umum pada Kantor Pembantu Bupati Semarang Wilayah Tuntang	1998
4.	Sekretaris Kecamatan Tuntang	2000 – 2004
5.	Camat Bancak	2004
6.	Camat Pringapus	2004
7.	Camat Pabelan	2005
8.	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Semarang	2011
9.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Semarang	2012

- i. Kekayaan

Tidak Bergerak

No	Jenis	Lokasi	Nilai (Rp)	Tahun Perolehan	Asal Kepemilikan
	Tidak diisi				

Bergerak

No	Jenis	Lokasi	Nilai (Rp)	Tahun Perolehan	Asal
----	-------	--------	------------	-----------------	------

					<b>Kepemilikan</b>
	Tidak diisi				

### 3. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- a. Nama : SUPARTI, SH.  
 b. NIP : 19630416 198603 2 013  
 c. Tempat/Tgl Lahir : Tulungagung / 16 April 1963  
 d. Jenis Kelamin : Perempuan  
 e. Jabatan : Kasubbag Perencanaan  
 f. Pendidikan : SI  
 g. Alamat : Jl. Yos Sudarso 24 Blanten RT 03 RW 08 Nyatnyono Ungaran Barat

- h. Riwayat Jabatan :

No	Jabatan	Tahun
1.	Kasubbag Perencanaan	2013

- i. Kekayaan

- Tidak Bergerak

No	Jenis	Lokasi	Nilai (Rp)	Tahun Perolehan	Asal Kepemilikan
	Tidak diisi				

- Bergerak

No	Jenis	Lokasi	Nilai (Rp)	Tahun Perolehan	Asal Kepemilikan
	Tidak diisi				

### 4. Kasubbag Administrasi dan Umum

- a. Nama : ETTY RETNO PALUPI, SH  
 b. NIP : 19691016199603 2 003  
 c. Tempat/Tgl Lahir : Pati / 16 Oktober 1969  
 d. Jenis Kelamin : Perempuan  
 e. Jabatan : Kasubbag Administrasi dan Umum  
 f. Pendidikan : SI  
 g. Alamat : Jl. Melati Baru II No 16 Ungaran 50512

- h. Riwayat Jabatan :

No	Jabatan	Tahun
1.	Kasubbid Pengumpulan Data dan Statistik pada Bappeda	2001 – 2006

	Kab. Blora	
2.	Kasi Sarana Prasarana Pasar dan Sektor Informal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang	2010 – 2013
3.	Kasi Sarana dan Prasarana Pasar pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Semarang	
4.	Kasubbag Tata Usaha Satpol PP Kab. Semarang	2013 – 2015
5.	Kasubbag Administrasi dan Umum pada Inspektorat Kab. Semarang	2015 – sekarang

## i. Kekayaan

## - Tidak Bergerak

No	Jenis	Lokasi	Nilai (Rp)	Tahun Perolehan	Asal Kepemilikan
	Tidak diisi				

## - Bergerak

No	Jenis	Lokasi	Nilai (Rp)	Tahun Perolehan	Asal Kepemilikan
	Tidak diisi				

## C. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT TAHUN 2016

Sesuai amanat peraturan perundang-undangan, maka transparansi dan akuntabilitas keuangan SKPD harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memenuhi kewajiban tersebut maka secara garis besar pengelolaan keuangan pada Inspektorat Kabupaten Semarang Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel C.1

Realisasi Anggaran Tahun 2016 Inspektorat Kabupaten Semarang

No	Program dan kegiatan	Input /Masukan(Rp)				Alasan
		Anggaran	Realisasi	Sisa	(%)	
1	2	3	4	5	6	
I	Belanja tidak langsung (gaji PNS)	3,453,193,000	3,332,153,012	121,039,988	96.49	Adanya pegawai yang pensiun dan mutasi
II	<b>Belanja langsung</b>					
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					
1)	Pengelolaan Surat Menyurat	17,640,000	17,640,000	-	100.00	

No	Program dan kegiatan	Input /Masukan(Rp)				Alasan
		Anggaran	Realisasi	Sisa	(%)	
1	2	3	4	5	6	
2)	Penyediaan Jasa dan komponen instalasi Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	78,000,000	56,064,800	21,935,200	71.88	Menyesuaikan tarif dasar dan efisiensi
3)	Penyediaan dan Perbaikan Peralatan Kerja serta Perlengkapan Kantor	19,985,000	19,985,000	-	100.00	
4)	Penyediaan Logistik Kantor	56,300,000	56,300,000	-	100.00	
5)	Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD	32,395,000	32,395,000	-	100.00	
6)	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6,482,000	6,482,000	-	100.00	
7)	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	120,777,000	120,772,600	4,400	99.99	
8)	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung / Teknis Perkantoran.	100,182,000	98,443,200	1,738,800	98.26	Efisiensi belanja premi asuransi kesehatan pegawai non PNS
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					
1)	Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor	190,000,000	189,537,000	463,000	99.76	Efisiensi pengadaan
2)	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	29,990,000	29,850,000	140,000	99.53	Efisiensi anggaran
3)	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	60,000,000	59,850,000	150,000	99.75	Penyesuaian tarif STNK
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>					
1)	Pengadaan pakaian dinas beserta	-	-	-		



No	Program dan kegiatan	Input /Masukan(Rp)				Alasan
		Anggaran	Realisasi	Sisa	(%)	
1	2	3	4	5	6	
	perlengkapannya					
2)	Pengelolaan administrasi kepegawaian	3,376,000	3,376,000	-	100.00	
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>					
1)	Sosialisasi/Bintek Peraturan Perundang-undangan	49,985,000	49,439,170	545,830	98.91	Efisiensi anggaran
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>					
1)	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Keuangan SKPD	13,838,000	13,838,000	-	100.00	
<b>6</b>	<b>Program perencanaan</b>					
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	14,309,000	14,309,000	-	100.00	
<b>7</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal &amp; Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>					
1)	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	1,096,215,000	1,096,099,000	116,000	99.99	
2)	Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat di Lingk. Pemda	111,211,000	110,951,000	260,000	99.77	Efisiensi anggaran
3)	Pengendalian Managemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	220,491,000	220,491,000	-	100.00	
4)	Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya	599,186,000	599,148,000	38,000	99.99	
5)	Inventarisasi Temuan Pengawasan	110,843,000	110,003,000	840,000	99.24	Sisa jasa akomodasi dan transportasi (pihak ketiga) yang menyesuaikan dengan

No	Program dan kegiatan	Input /Masukan(Rp)				Alasan
		Anggaran	Realisasi	Sisa	(%)	
1	2	3	4	5	6	
						penyelenggara
6)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	317,222,000	317,222,000	-	100.00	
7)	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	42,604,000	42,604,000	-	100,00	
8)	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan (LARWASDA)	19,060,000	17,410,000	1,650,000	91.34	Pelaksanaan LARWASDA tidak mengundang pembicara dari luar sehingga ada efisiensi honor narasumber
9)	Sistem pengendalian intern pemerintah dan penilaian akuntabilitas kinerja	67,355,000	67,355,000	-	100.00	
10)	Review Dokumen Rencana Pembangunan, Anggaran, Laporan Keuangan Daerah	173,621,000	173,621,000	-	100.00	
<b>8</b>	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>					
1)	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	27,166,000	27,166,000	-	100.00	
<b>9</b>	<b>Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan</b>					
1)	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	2,980,000	2,980,000	-	100.00	-
<b>10</b>	<b>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>					
1)	Penatausahaan penanganan pengaduan masyarakat	2,740,000	2,740,000	-	100.00	

No	Program dan kegiatan	Input /Masukan(Rp)				Alasan
		Anggaran	Realisasi	Sisa	(%)	
1	2	3	4	5	6	
	<b>Jumlah Belanja Langsung</b>	<b>3,583,953,000</b>	<b>3,556,071,770</b>	<b>27,881,230</b>	<b>99.22</b>	
	<b>Jumlah semua</b>	<b>7,037,146,000</b>	<b>6,888,224,782</b>	<b>148,921,218</b>	<b>97.88</b>	

Berdasarkan tabel diatas, perencanaan keuangan untuk mewujudkan kinerja Inspektorat Kabupaten Semarang adalah sebesar Rp7.037.146.000 dengan realisasi sebesar Rp6.888.224.782 atau sebesar 97,88%. Tingkat efisiensi penyerapan anggaran tertinggi terlaksana pada program pelayanan administrasi perkantoran kegiatan penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik karena pengeluaran menyesuaikan tarif dasar listrik dan telepon dan efisiensi penggunaan sumberdaya listrik, telepon, dan air. Selain itu terdapat efisiensi dari kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan (LARWASDA) sebesar 91,34%. Efisiensi dalam Pelaksanaan LARWASDA dapat dilakukan karena tidak mengundang pembicara dari luar sehingga ada efisiensi honor narasumber.

Sisa anggaran pada belanja tidak langsung bersumber dari access gaji, sedangkan pada belanja langsung dikarenakan efisiensi anggaran dan sisa pengadaan barang/jasa.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat pada tahun 2015 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kegiatan, meliputi:

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat;
- 2) Penyediaan jasa komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- 3) Penyediaan dan perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor;
- 4) Penyediaan logistik kantor;
- 5) Penatausahaan administrasi keuangan;
- 6) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- 7) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- 8) Penyediaan jasa pendukung/ teknis perkantoran;
- 9) Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor;
- 10) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
- 11) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional;
- 12) Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya;

- 13) Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 14) Sosialisasi/ bintek peraturan perundang-undangan;
- 15) Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD;
- 16) Penyusunan dokumen perencanaan;
- 17) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;
- 18) Penanganan kasus pengaduan masyarakat dilingkungan pemda;
- 19) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH;
- 20) Penanganan kasus pengaduan pada wilayah pemerintahan di bawahnya;
- 21) Inventarisasi temuan pengawasan;
- 22) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan;
- 23) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;
- 24) Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan;
- 25) Penilaian akuntabilitas kinerja;
- 26) Reviu laporan keuangan;
- 27) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
- 28) Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan; dan
- 29) Penatausahaan penanganan pengaduan masyarakat.

#### D. CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Capaian kinerja Inspektorat yang mendukung pencapaian IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

##### Tujuan 4:

Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan, Pelayanan Masyarakat dan Pembangunan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.

##### Sasaran Daerah :

Meningkatkan kemampuan manajemen pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang *responsive gender* dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal.

**Tabel D.1**

*Capaian Kinerja IKU Pemerintah Daerah*

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Target Akhir Periode Renstra	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Prosentase Jumlah SKPD	Jumlah pengawasan Internal berkala	96	96	576	100

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Target Akhir Periode Renstra	%
1	2	3	4	5	6	7
	yang menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah	Jumlah Hasil temuan pengawasan yang ditindaklanjuti	180	182	1226	101,1
		Jumlah Pengaduan Kasus yang tertangani	13	11	128	84,62
		Jumlah pejabat fungsional bidang pengawasan	18	18	18	100
		Prosentase laporan keuangan SKPD yang direviu	100%	100%	100%	100
	<b>Rata – Rata Capaian Kinerja IKU</b>				<b>100%</b>	<b>97,12</b>

Rata-rata capaian kinerja IKU Pemerintah Daerah dimana yang menjadi tanggung jawab Inspektorat adalah sebesar 97,124% atau baik. Keberhasilan capaian kinerja tersebut ditunjukkan oleh capaian 3 (tiga) IKU yang telah dapat memenuhi target dan 1 (satu) IKU yang melebihi target. Hanya 1 (satu) IKU yang tidak mencapai target. Keberhasilan ini ditunjukkan dengan realisasi pengawasan Internal berkala, pejabat fungsional bidang pengawasan, dan laporan keuangan SKPD yang direviu sesuai target. Jumlah Hasil temuan pengawasan yang ditindaklanjuti melebihi target (101%). Faktor – faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kemampuan teknis dan pengalaman tim pemeriksa;
2. Kerjasama antara tim pemeriksa dengan obyek pemeriksaan;
3. Itikad yang baik dari obyek pemeriksaan untuk melakukan perbaikan internal.

Pengaduan kasus hanya 11 aduan yang masuk (84,62%) dari 13 aduan yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena minimnya jumlah pengaduan masyarakat yang dilaporkan ke Inspektorat Kabupaten Semarang. Namun sebenarnya hal tersebut tidak menjadi persoalan karena persentase banyaknya kasus yang tertangani bergantung dari jumlah aduan yang masuk ke Inspektorat. Jika aduan yang masuk sedikit bukan berarti kinerja Inspektorat rendah, namun sebaliknya, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemerintahan desa dan pemerintah daerah telah dilaksanakan dengan baik dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## E. CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA SASARAN

Uraian capaian kinerja Inspektorat untuk setiap sasaran strategis pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

### 1. Tujuan Pertama :

Mewujudkan pengawasan yang mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai *good goverment* dan *clean governance*.

### Sasaran pertama :

Meningkatnya pengawasan yang meliputi pemeriksaan terhadap instansi pemerintah dan BUMD di lingkungan pemerintah Kabupaten Semarang terhadap penyelenggaraan APBD maupun kinerja aparatur.

Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan 1 (satu) Program dengan 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

- a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
  - Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala;
  - Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemda; dan
  - Kegiatan Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya.

Hasil capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel E.1**

*Capaian Kinerja Indikator Sasaran Meningkatnya pengawasan*

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Target Akhir Periode Renstra	%
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah pengawasan Internal berkala	96	96	576	100
2	Jumlah Pengaduan Kasus	13	11	128	84,62
3	Prosentase Pengaduan Kasus yang tertangani	100%	100%	100%	100
4	Jumlah pelaksanaan Pemeriksaan khusus (LHP)	48	48	328	100
5	Prosentase Hasil temuan pengawasan yang ditindaklanjuti	65	80,08	80%	123,20
<b>Rata rata Capaian Kinerja Sasaran</b>					<b>101,56</b>

Rata – rata capaian kinerja Inspektorat dalam meningkatnya pengawasan yang meliputi pemeriksaan terhadap instansi pemerintah dan BUMD di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Semarang terhadap penyelenggaraan APBD maupun kinerja aparatur pada tahun 2016 adalah sebesar 101,56% atau sangat baik. Keberhasilan tersebut ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja Jumlah pengawasan Internal berkala, prosentase pengaduan kasus yang terangani, dan jumlah pelaksanaan pemeriksaan khusus. Terdapat 1 (satu) kegiatan yang masih dibawah target, yaitu jumlah pengaduan kasus (84,62%). Namun disisi lain terdapat indikator kinerja prosentase hasil temuan pengawasan yang ditindaklanjuti jauh melebihi target sebesar 123,20%. Faktor – faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kemampuan teknis dan pengalaman tim pemeriksa.
2. Kerjasama antara tim pemeriksa dengan obyek pemeriksaan.
3. Itikad yang baik dari obyek pemeriksaan untuk melakukan perbaikan internal.

### Jumlah pengaduan masyarakat

Meskipun kategori rata-rata capaian kinerja IKU Pemerintah Daerah baik, namun, masih terdapat indikator kinerja yang belum dapat memenuhi target, yaitu Jumlah Pengaduan Kasus yang capaian kinerjanya sebesar 11 aduan atau 84,62% dari target sebesar 13 aduan. Tidak maksimalnya capaian indikator kinerja tersebut karena minimnya jumlah pengaduan masyarakat yang dilaporkan ke Inspektorat Kabupaten Semarang. Pembagian jenis aduan yang diterima Inspektorat Kabupaten Semarang pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel E.2**

*Hasil Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat*

No	Jenis Pengaduan	2015	2016	Target Akhir Periode Renstra
1	Jumlah Aduan	5	11	128
2	Aduan yang ditindaklanjuti	5	11	128
3	Aduan Tidak Terbukti	2	1	0
4	Aduan Terbukti	3	10	128

Sumber data : Inspektorat Kab. Semarang Tahun 2016

**Tabel E.3**

*Pengaduan Masyarakat Kepada Inspektorat Kabupaten Semarang*

No	Jenis Pengaduan	2015	2016
1	Disiplin Pegawai	1	1
2	Penyalahgunaan Wewenang	1	4
3	Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan	3	2
4	Penyelewengan jabatan	-	2
5	Kerugian Negara/Daerah (TPTGR)	-	2

Sumber data : Inspektorat Kab. Semarang Tahun 2016

Untuk menyasati tidak tercapainya target aduan masyarakat, inspektorat Kabupaten Semarang melakukan serangkaian upaya untuk meningkatkan jumlah aduan atas penyimpangan dan/atau ketidakwajaran yang ditemukan dalam pemerintahan tingkat kabupaten dan tingkat desa. Adapun upaya yang dilakukan adalah:

1. Mengaktifkan layanan pengaduan secara online melalui website inspektorat;
2. Sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung pada saat pemeriksaan, pembinaan kinerja ataupun reuiu;
3. Pembentukan tim satgas Saber Pungli; dan
4. Penerbitan leaflet yang dibagikan secara cuma-cuma kepada masyarakat.

### **Jumlah hasil temuan pengawasan yang ditindaklanjuti**

Inventaris temuan pengawasan, dengan realisasi sebanyak 5 data temuan pengawasan APF laporan pengawasan fungsional: Inspektorat kabupaten, Inspektorat Propinsi, BPKP, Inspektorat Jenderal kementerian teknis dan Badan Pengawas Keuangan (BPK), 2 bahan pemutakhiran, 12 laporan pengawasan, 2 laporan ikhtisar hasil pengawasan, berikut merupakan data jumlah, jenis dan kerugian hasil tindak lanjut pemeriksaan di Kabupaten Semarang tahun 2016.

## **2. Tujuan Kedua :**

Meningkatkan pengawasan melekat dan pengendalian internal pada dinas/instansi yang menjadi obyek pemeriksaan.

### **Sasaran kedua :**

Meningkatnya tindakan preventif dan korektif terhadap penyimpangan pelanggaran pada instansi/lembaga/satuan kerja.

Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan 2 (dua) Program dengan 8 (delapan) kegiatan, yaitu :

- a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
  - Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
  - Kegiatan Inventarisasi temuan pemeriksaan
  - Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
  - Kegiatan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
  - Kegiatan Evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan (Larwasda)



- Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
  - Kegiatan Reviu Dokumen Rencana Pembangunan, Anggaran, Laporan Keuangan Daerah
- b. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
- Kegiatan Penatausahaan penanganan pengaduan masyarakat.

Hasil capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel E.4**

*Capaian Kinerja Indikator Sasaran Meningkatnya tindakan preventif dan korektif*

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Target Akhir periode Renstra	%
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah sosialisasi pengawasan/pemantauan	96	96	456	100
2	Jumlah laporan keuangan SKPD yang direviu	20	20	114	100
3	Prosentase hasil reviu laporan Keuangan yang ditindaklanjuti oleh SKPD	100	100	100	100
4	Jumlah LKjIP SKPD yang direviu	35	35	210	100
5	Prosentase hasil Reviu LKjIP yang ditindaklanjuti SKPD	100	100	100	100
Rata rata Capaian sasaran					100

Rata – rata capaian kinerja Inspektorat dalam meningkatnya tindakan preventif dan korektif terhadap penyimpangan pelanggaran pada instansi/lembaga/satuan kerja pada tahun 2016 adalah sebesar 100% atau baik. Keberhasilan tersebut ditunjukkan oleh semua capaian indikator kinerja yang telah dapat memenuhi target. Faktor – faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kemampuan teknis dan pengalaman tim pemeriksa
2. Kerjasama antara tim pemeriksa dengan obyek pemeriksaan.
3. Itikad yang baik dari obyek pemeriksaan untuk melakukan perbaikan internal.
4. Semakin meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal SKPD.

#### **Prosentase Laporan Keuangan SKPD yang Direviu**

Pada tahun 2016 dilaksanakan reviu terhadap SKPD sesuai dengan rencana dalam DPA yaitu 20 SKPD dan terealisasi 100% pada: Badan Kepegawaian Daerah,

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kelurahan Ungaran, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Kecamatan Bergas, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Pendidikan dan kebudayaan, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kantor Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kelurahan Kupang, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Kecamatan Ungaran Timur, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Tindak lanjut atas Reviu Laporan Keuangan pada SKPD pada tahun 2016 telah dilaksanakan oleh seluruh SKPD (100%). Diharapkan kondisi ini dapat dipertahankan hingga akhir periode Renstra yang ditargetkan konstan pada 100%.

### 3. Tujuan Ketiga :

Meningkatkan profesionalisme aparatur Inspektorat

#### Sasaran :

Meningkatnya penguasaan SDM pengawasan terhadap bidang tugasnya Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan 3 (tiga) Program dengan 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

- a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - Kegiatan Sosialisasi/Bintek Peraturan Perundang-undangan
- b. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa & aparatur pengawasan
  - Kegiatan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa & aparatur pengawasan
- c. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
  - Kegiatan penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Hasil capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel E.5**

*Capaian Kinerja Indikator Sasaran Meningkatnya Penguasaan SDM Pengawasan*

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Target Periode Akhir Renstra	%
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah pejabat fungsional bidang	18	18	18	100

	pengawasan				
2	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	8	8	58	100
3	Jumlah SOP Pengawasan yang tersusun	1	1	6	100
Rata rata Capaian sasaran					100

Di tahun 2016 semua target telah tercapai. Jumlah pejabat fungsional bidang pengawasan masih tetap sama. Realisasi jumlah aparatur yang ditunjuk untuk mengikuti diklat sama dengan target awal. Dan SOP pengawasan telah tersusun, berupa pembuatan leaflet untuk dibagikan kepada masyarakat umum. Faktor – faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Dukungan dari kepala daerah dan kepala Inspektorat untuk mendukung peningkatan kapasitas PNS.
2. Tingginya semangat dan keinginan untuk meningkatkan kualitas diri dari para APIP.
3. Kerjasama yang baik dengan BPKP selaku pembina kepegawaian APIP.

Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas serta profesionalisme aparatur fungsional bidang pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Semarang, melalui pelatihan di kantor sendiri (PKS) dengan narasumber dari BPKP dan Inspektorat Propinsi, juga pelatihan peningkatan kapasitas APIP dengan metode IACM oleh BPKP-RI.

#### 4. Tujuan Keempat :

Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan aparatur yang profesional dan akuntabel.

##### **Sasaran :**

Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi dan sarana prasarana pendukung pengawasan.

Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan 3 (tiga) Program dengan 5 (lima) kegiatan, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Kegiatan Penyediaan Jasa dan perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
  - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor
  - Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional

## 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Hasil capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel E.5

*Capaian Kinerja Indikator Sasaran Meningkatnya pelayanan administrasi dan sarana prasarana pendukung pengawasan.*

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Target Periode Akhir Renstra	%
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana dan fasilitas perkantoran	190.000.000	198.880.000	190.000.000	104,7
	Prosentase kebutuhan sarana perkantoran yang terpenuhi	100%	98%	100%	98
	Prosentase sarana prasarana yang berkondisi baik	100%	95%	100%	95
	Rasio penyerapan anggaran yang sesuai perencanaan	100%	99%	100%	99
<b>Rata rata Capaian sasaran</b>					<b>99,17</b>

Rata – rata capaian kinerja Inspektorat dalam sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan sarana prasarana pendukung pengawasan pada tahun 2016 adalah sebesar 99,17% atau baik. Pada prosentase kebutuhan sarana perkantoran yang terpenuhi pada tahun 2016 sebesar 98%. Pada tahun 2016 pemenuhan sarana dan prasarana terpenuhi dengan adanya pengadaan sarpras yang sangat mendukung kelancaran kinerja aparatur di Inspektorat. Prosentase sarana prasarana yang berkondisi baik Pada tahun 2015 sebanyak 95% pengadaan bernege modal membuat prosentase barang yang berkondisi baik, karena sarana yang lama telah digantikan oleh sarana prasarana yang baru. Rasio penyerapan anggaran yang sesuai perencanaan Pada tahun 2016 sebanyak 99%.

Faktor – faktor yang mendukung pencapaian kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan barang modal yang sesuai kebutuhan;
2. Meningkatnya kemampuan pegawai Inspektorat dalam pelayanan administrasi dan sarana prasarana pendukung pengawasan.

## F. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016

### 1. NERACA

Tabel F.1

Neraca Inspektorat Kabupaten Semarang Per 31 Desember 2016 dan 2015

Uraian	Jumlah (Rp.)	
	2016	2015
<b>ASET</b>	<b>1.548.263.197,00</b>	<b>1.492.764.619,00</b>
<b>ASET LANCAR</b>	<b>450.600,00</b>	<b>2.850.325,00</b>
<b>Persediaan</b>	<b>450.600,00</b>	<b>2.850.325,00</b>
<b>Persediaan Bahan Pakai Habis</b>	<b>450.600,00</b>	<b>2.850.325,00</b>
PersediaanAlatTulis Kantor	87.600,00	992.825,00
PersediaanBarangCetakan	363.000,00	1.857.500,00
<b>ASET TETAP</b>	<b>1.547.812.597,00</b>	<b>1.489.914.294,00</b>
<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>1.512.227.266,00</b>	<b>1.293.231.292,00</b>
<b>Alat-alat Bantu</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>
Pompa	475.000,00	475.000,00
<b>Alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>817.67.056,00</b>	<b>786.236.082,00</b>
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	698.863.854,00	698.863.854,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	118.823.202,00	87.374.228,00
<b>Alat Angkutan Berat Tak Bermotor</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
Kendaraan Tak Bermotor Khusus	600.000,00	600.000,00
<b>Alat Bengkel Tak Bermesin</b>	<b>7.099.000,00</b>	<b>7.099.000,00</b>
Perkakas Bengkel Service	7.099.000,00	7.099.000,00
<b>Alat Ukur</b>	<b>1.632.500,00</b>	<b>1.632.500,00</b>
Alat ukur universal	1.632.500,00	1.632.500,00
<b>Alat Kantor</b>	<b>64.897.222,00</b>	<b>42.477.222,00</b>
MesinTik	4.162.500,00	4.162.500,00
Mesin Hitung/Jumlah	4.200.000,00	4.200.000,00
Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	56.534.722,00	34.114.722,00
<b>AlatRumahTangga</b>	<b>239.806.312,00</b>	<b>133.396.312,00</b>
Meubelair	102.032.836,00	33.122.836,00
Alat Pendingin	62.906.091,00	38.906.091,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	64.678.775,00	51.178.775,00
Alat Pemadam Kebakaran	6.688.610,00	6.688.610,00
Alat Pemetong Rumput	3.500.000,00	3.500.000,00
<b>Komputer</b>	<b>238.553.747,00</b>	<b>202.806.747,00</b>
Personal Komputer	212.086.674,00	179.309.674,00
Peralatan Komputer Mainframe	1.550.000,00	1.550.000,00
Peralatan Personal Komputer	2.970.000,00	0
Peralatan Jaringan	2.500.000,00	2.500.000,00
Laptop/Notebook	19.447.073,00	19.447.073,00
<b>Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat</b>	<b>29.387.227,00</b>	<b>29.387.227,00</b>
Meja Kerja Pejabat	11.500.000,00	11.500.000,00
Kursi Kerja Pejabat	17.887.227,00	17.887.227,00
<b>Alat Studio</b>	<b>86.781.202,00</b>	<b>83.811.202,00</b>
Peralatan Studio Visual	86.781.202,00	83.811.202,00
<b>Alat Komunikasi</b>	<b>25.308.000,00</b>	<b>5.308.000,00</b>
Alat Komunikasi Telephone	25.308.000,00	5.308.000,00
<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>1.071.880.980,00</b>	<b>1.071.880.980,00</b>
<b>Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>	<b>1.071.880.980,00</b>	<b>1.071.880.980,00</b>
Bangunan Gedung Kantor	1.071.880.980,00	1.071.880.980,00
<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
<b>Jaringan Listrik</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
Jaringan Transmisi	1.600.000,00	1.600.000,00
<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>24.650.000,00</b>	<b>22.450.000,00</b>
<b>Buku</b>	<b>24.650.000,00</b>	<b>22.450.000,00</b>

Umum	6.100.000,00	6.100.000,00
Ilmu Sosial	18.550.000,00	16.350.000,00
<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(1.062.545.649,00)</b>	<b>(899.247.978,00)</b>
<b>Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	<b>(721.500.092,00)</b>	<b>(627.381.198,00)</b>
Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu	(201.875,00)	(166.250,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	(455.253.575,00)	(398.887.572,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	(135.000,00)	(90.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	(4.117.420,00)	(3.691.480,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur	(946.850,00)	(848.900,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	(24.856.976,00)	(22.491.955,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	(71.293.371,00)	(60.684.311,00)
Akumulasi Penyusutan Alat RumahTangga	(96.270.227,00)	(80.781.729,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer	(11.052.021,00)	(8.847.978,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	(53.370.144,00)	(47.393.490,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	(4.002.633,00)	(3.497.533,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio	<b>(326.458.890,00)</b>	<b>(259.626.780,00)</b>
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	(326.458.890,00)	(259.626.780,00)
<b>Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>	<b>(352.000,00)</b>	<b>(256.000,00)</b>
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	(256.000,00)	(256.000,00)
<b>Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>(14.234.667,00)</b>	<b>(11.984.000,00)</b>
Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik	(14.234.667,00)	(11.984.000,00)
<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya</b>		
Akumulasi Penyusutan Buku		
<b>Jumlah Aset</b>	<b>1.548.263.197,00</b>	<b>1.492.764.619,00</b>

## 2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tabel F.2

Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat Kabupaten Semarang  
Per 31 Desember 2016 dan 2015

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	-	-	-
<b>1.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	-	-	-
1.1.1.	Hasil Pajak Daerah	-	-	-
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	-	-	-
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	-	-	-
<b>1.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	-	-	-
<b>1.2.1</b>	<b>Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak</b>	-	-	-
1.2.1.1	a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-
1.2.1.2	b. Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-	-
1.2.1.3	c. Pendapatan Dana Alokasi Umum	-	-	-
1.2.1.4	d. Pendapatan Dana Alokasi Khusus	-	-	-
<b>1.2.2</b>	<b>Transfer dari Pemerintah Pusat - Lainnya</b>	-	-	-
1.2.2.1	a. Dana Otonomi Khusus	-	-	-
1.2.2.2.	b. Dana Penyesuaian	-	-	-
<b>1.2.3.</b>	<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>	-	-	-
1.2.3.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-
<b>1.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	-	-	-
1.3.1.	Pendapatan Hibah	-	-	-

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5
1.3.2.	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-
1.3.3.	Pendapatan Lainnya	-	-	-
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	-	-	-
<b>2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>7.037.146.000</b>	<b>6.888.224.782</b>	<b>148.921.218</b>
<b>2.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>6.846.936.000</b>	<b>6.698.477.782</b>	<b>148.458.218</b>
2.1.1.	1. Belanja Pegawai	3.929.873.000	3.808.833.012	121.039.988
2.1.2.	2. Belanja Barang dan Jasa	2.917.063.000	2.889.644.770	27.418.230
2.1.3.	3. Belanja Bunga	-	-	-
2.1.4.	4. Belanja Hibah	-	-	-
2.1.5.	5. Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
2.1.6.	6. Belanja bantuan Keuangan	-	-	-
<b>2.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>190.210.000</b>	<b>189.747.000</b>	<b>463.000</b>
2.2.1	Tanah	-	-	-
2.2.2	Peralatan dan mesin	188.010.000	187.547.000	463.000
2.2.3	Gedung dan Bangunan	-	-	-
2.2.4	Jalan, irigasi dan jaringan	-	-	-
2.2.5	Aset Tetap Lainnya	2.200.000	2.200.000	-
<b>2.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	-	-	-
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	-	-	-
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>7.037.146.000</b>	<b>6.888.224.782</b>	<b>148.921.218</b>
<b>2.4.</b>	<b>TRANSFER</b>	-	-	-
<b>2.4.1.</b>	<b>TRANSFER BAGI HASIL KE DESA</b>	-	-	-
2.4.1.1.	Bagi Hasil Pajak	-	-	-
2.4.1.2.	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-
2.4.1.3.	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-
	<b>JUMLAH TRANSFER</b>	-	-	-
	<b>JUMLAH BELANJA &amp; TRANSFER</b>	<b>7.037.146.000</b>	<b>6.888.224.782</b>	<b>148.921.218</b>
	<b>SURPLUS(DEFISIT)</b>	<b>(7.037.146.000)</b>	<b>(6.888.224.782)</b>	<b>(148.921.218)</b>

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Tabel F.3

Laporan Operasional Inspektorat Kabupaten Semarang  
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2016 dan 2015

Nomor Urut	Uraian	Saldo 2016	Saldo 2015	kenaikan / penurunan
1	2	3	4	5
<b>9</b>	<b>BEBAN</b>	<b>6.864.175.178,00</b>	<b>5.671.493.529,00</b>	<b>1.192.681.649</b>
<b>9.1</b>	<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>6.864.175.178,00</b>	<b>5.671.493.529,00</b>	<b>1.192.681.649</b>
9.1.1.	Beban Pegawai-LO	3.808.833.012,00	4.409.398.228,00	(600.565.216)
9.1.2.	Beban Barang dan Jasa	2.892.044.495,00	1.149.172.321,00	1.742.872.174
9.1.3.	Beban Bunga	-	-	-
9.1.4.	Beban Subsidi	-	-	-
9.1.5.	Beban Hibah	-	-	-
9.1.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	163.297.671,00	112.922.980,00	50.374.691
9.1.8.	Beban Penyisihan Piutang	-	-	-
9.1.9.	Beban lain-lain	-	-	-

Nomor Urut	Uraian	Saldo 2016	Saldo 2015	kenaikan / penurunan
1	2	3	4	5
<b>9.2</b>	<b>BEBAN TRANSFER</b>	-	-	-
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>6.864.175.178,00</b>	<b>5.671.493.529,00</b>	<b>1.192.681.649</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>(6.864.175.178,00)</b>	<b>(5.671.493.529,00)</b>	<b>(1.192.681.649)</b>

#### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**Tabel F.4**

*Laporan Perubahan Ekuitas Inspektorat Kabupaten Semarang  
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2016 dan 2015*

Uraian	Saldo 2016	Saldo 2015
<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>(4.070.169.755,00)</b>	<b>1.601.323.774,00</b>
RK PPKD	12.482.608.130,00	5.562.934.374,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR	(6.864.175.178,00)	0
<b>JUMLAH EKUITAS AKHIR</b>	<b>1.548.263.197,00</b>	<b>1.492.764.619,00</b>

## BAB II

### INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA



### 1) Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)

Dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Inspektorat Kabupaten Semarang mengadakan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS). Pada tahun 2016, Inspektorat telah melaksanakan PKS sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 7-8 Januari 2016 dengan tema "LKD Berbasis Akruar" dan tanggal 21-22 September 2016 dengan tema "Penilaian & Strategi Peningkatan Maturitas SPIP".

### 2) Website Inspektorat

Dalam upaya untuk peningkatan akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik, maka inspektorat turut membangun website SKPD. Dengan dikoordinir oleh Bagian Pengelolaan Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang, Inspektorat bersama 28 SKPD lain mulai membangun situs sendiri.

Persiapan telah dilakukan sejak tahun 2012 untuk membangun website berbasis joomla (*open-source*). Dan pada bulan Februari 2014, secara resmi website Inspektorat diluncurkan. Saat ini website dikelola oleh subbagian administrasi dan umum Bidang Sekretariat Inspektorat Kab. Semarang. Adapun alamat website Inspektorat Kab. Semarang saat ini adalah [www.semarangkab.go.id/skpd/itwil](http://www.semarangkab.go.id/skpd/itwil).

### 3) PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)

Kegiatan PMPRB ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Adapun tujuan dilakukan PMPR, adalah untuk:

- a. Memperoleh informasi tentang pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan internal instansi pemerintah;
- b. Menggambarkan pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan internal instansi pemerintah;
- c. Memonitor rencana aksi tindak lanjut hasil penilaian mandiri di lingkungan internal instansi pemerintah periode sebelumnya.

### 4) Rapat Koordinasi Pengawasan Terbatas (Rakorwastas)

RAKORWAS tahun 2016 dilaksanakan pada bulan Februari 2016 di Hotel Amanda Bandung Kabupaten Semarang. Rakorwas diisi paparan oleh narasumber dan sesi

tanya jawab. Nara sumber kegiatan ini adalah Inspektorat Propinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Negeri Ambarawa.

### 5) Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda)

Larwasda tahun 2016 diadakan pada bulan Oktober bertempat di Inspektorat Kabupaten Semarang. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk lebih meningkatkan fungsi dan peranan pengawasan. Dengan adanya Larwasda diharapkan dapat meningkatkan rasa mawas diri sebagai tindak cegah tangkal melakukan penyimpangan, penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang, selanjutnya kesalahan yang sama pada SKPD yang menjadi obyek pemeriksaan diharapkan tidak terjadi lagi dan dimasa yang akan datang agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan yang berlaku. Melalui gelar pengawasan ini akan dapat dievaluasi seberapa jauh komitmen obyek pemeriksaan dalam berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjanya dengan mendayagunakan masukan dari hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

### 6) Pemantauan dan Pembinaan Kinerja

Berdasarkan UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Bab XII Pembinaan dan Pengawasan, pasal 217, ayat (1) berbunyi, "Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi : e. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan."

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada Bab II pasal 2 ayat (2) "Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan terhadap kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, dan kepala desa, perangkat desa dan anggota badan permusyawaratan desa." Dan Bab III, bagian kesatu pasal 20 berbunyi "Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah meliputi : c. pelaksanaan urusan pemerintahan desa."

Oleh karena itu, pembinaan dan pemantauan kinerja dirasa penting untuk membantu obrik untuk lebih meningkatkan tertib administrasi dan tidak melakukan kesalahan yang berulang setiap tahun. Permasalahan yang sering dijumpai di desa, yaitu : pajak pembelian barang/jasa yang tidak dipungut dan dibayarkan, LKD banyak yang macet,

masih banyak yang belum diterbitkan SK Kepala Desa untuk yang menerima raskin, dan masih banyak desa yang tidak membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR).

## 7) **Reviu**

Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa aparat pengawasan intern pemerintah pada pemerintah daerah melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Adapun reviu yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Semarang adalah:

- Reviu LKJIP 2015 pada bulan Januari 2016
- Reviu atas LKD 2015 pada bulan Januari – Februari 2016.
- Reviu atas RKA 2017 pada bulan Oktober 2016.

## 8) **Evaluasi SPIP**

Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme menuju tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam suatu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh karenanya dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas dan kinerja instansi pemerintah serta kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi terhadap laporan tersebut. Pelaksanaan evaluasi SPIP tahun 2016 dibantu oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

## 9) **Kunjungan ke Inspektorat Kabupaten Semarang**

Sebagai salah satu kabupaten/kota yang mendapatkan predikat opini tertinggi dari BPK "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)" dan hingga tahun 2016 ini Kabupaten Semarang telah mendapatkan prestasi istimewa karena telah dapat meraih opini WTP selama 5 tahun berturut-turut, dan salah satu faktor yang cukup menonjol adalah kerja Inspektorat Kabupaten Semarang untuk mendorong SKPD di Kabupaten Semarang dapat melaksanakan kegiatan administrasi, keuangan dan kinerja secara tertib dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Maka tidak salah jika Inspektorat menjadi tujuan dari daerah lain untuk menggali kunci sukses dan upaya dari Inspektorat hingga Kabupaten Semarang meraih prestasi yang membanggakan tersebut. Pada tahun 2016 Inspektorat Kabupaten Semarang telah dikunjungi dua Inspektorat yaitu tanggal 21 Januari 2016 dikunjungi Inspektorat Kabupaten Kediri dan tanggal 29 Juli 2016 Inspektorat Kabupaten Pacitan.

### BAB III

#### INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

##### 1) Daftar Objek Pemeriksaan

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. Sekretariat Daerah          | 21. Kantor Kesbanglinmas               |
| 2. Sekretariat DPRD            | 22. Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah |
| 3. BAPPEDA                     | 23. Kantor Ketahanan Pangan            |
| 4. BKD                         | 24. Satuan Polisi Pamong Praja         |
| 5. Badan KB & PP               | 25. PDAM                               |
| 6. Bapermasdes                 | 26. BPR/BKK                            |
| 7. BLH                         | 27. Apotik Sidowaras                   |
| 8. Dinas Pendidikan            | 28. RSUD Ungaran                       |
| 9. Dinas Kesehatan             | 29. RSUD Ambarawa                      |
| 10. Dinsosnakertrans           | 30. UPTD Pasar                         |
| 11. Dishubkominfo              | 31. UPTD Terminal & Parkir             |
| 12. Dinas Kependudukan & Capil | 32. UPTD Dinas Pendidikan              |

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 13. Dispora & Pariwisata                    | 33. UPTD KB & PP          |
| 14. DPU                                     | 34. UPTD Obyek Wisata     |
| 15. Dinas Koperasi UMKM & Perindag          | 35. UPTD Dinas Pertanian  |
| 16. Dinas Pertanian, Perkebunan & Kehutanan | 36. UPTD Dinas Peternakan |
| 17. Dinas Peternakan & Perikanan            | 37. SMA                   |
| 18. DPPKAD                                  | 38. SMP                   |
| 19. UPTD Puskesmas                          | 39. Desa se Kabupaten     |
| 20. Kecamatan se Kabupaten                  |                           |

## 2) Sarana prasarana inspektorat

Uraian	Jumlah	Nilai (Rp)	Kondisi
Tanah (m <sup>2</sup> )	13.760	-	-
Gedung (ruang)	10	1.071.880.980	baik
Kendaraan R4 (unit)	6	384.172.152	baik
Kendaraan R2 (unit)	10	87.374.228	9 baik 1 rusak
Komputer PC (unit)	14	106.306.288	13 baik 1 rusak
Laptop (unit)	8	73.006.386	7 baik 1 rusak
Jaringan Komputer (unit)	1	1.408.000	baik
Mebelair (unit)	4	27.897.163	baik
Brankas dan almari besi (unit)	8	14.839.555,00	baik

## BAB IV

### PENUTUP

Pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen, dimana bersama-sama dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan memberikan peranan yang cukup signifikan untuk keberhasilan suatu program kegiatan.

Semoga laporan layanan informasi publik Inspektorat Kabupaten Semarang ini dapat memberi manfaat bagi pembaca sekalian.

Ungaran, 3 Juni 2017

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
INSPEKTORAT KABUPATEN SEMARANG

Drs. DWI BAYU YUNANTONO

Pembina Utama Muda

NIP. 195906171985031016